



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Sidang : III
Rapat : Ke –
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Senin, 12 Maret 2012
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.30 WIB s.d 17.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Pembahasan awal Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga RAPBN-P 2012 mitra kerja Komisi V
DPR RI.
Ketua Rapat : Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri
Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal,
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala
Badan SAR Nasional, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala BP-
BPWS diwakili Deputi Perencanaan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 wib setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan semua mitra kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah pembahasan awal Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga RAPBN-P 2012 mitra kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala BP-BPWS yang diwakili Deputi Perencanaan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI menerima usulan perubahan alokasi anggaran untuk Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI yang diajukan Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

Dalam Miliar Rupiah

No	Kementerian Negara/Lembaga	APBN	RAPBN-P	Perubahan	%
1	Kementerian Pekerjaan Umum	62.563,1	73.801,1	11.238,1	+ 18,0%
2	Kementerian Perhubungan	28.117,7	36.708,1	8.590,3	+ 30,6%
3	Kementerian Perumahan Rakyat	4.604,1	5.928,5	1.324,4	+ 28,8%
4	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.018,3	1.103,8	85,5	+ 8,4%
5	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.341,2	1.284,0	(- 57,2)	(- 4,3%)
6	Badan SAR Nasional	1.111,7	992,1	(- 119,6)	(- 10,8%)
7	BPLS	1.606,9	1.533,3	(- 73,5)	(- 4,6%)
8	BPWS	299,6	268,2	(- 31,4)	(- 10,5%)

2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat bahwa pemanfaatan anggaran SAL tahun 2011 sebesar Rp 12,29 Triliun serta pemotongan anggaran K/L sebesar Rp. 1,052 Triliun dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Ditjen Sumber Daya Air : Rp. 2.678 Miliar
 - b. Ditjen Bina Marga : Rp. 9.612 Miliar
3. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum sepakat melakukan penambahan alokasi sebesar Rp 850 Miliar dari SiLPA tahun 2012 untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sekurang-kurangnya 3.000 desa.
4. Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat bahwa penambahan anggaran SAL tahun 2011 sebesar Rp 9.117 Miliar dengan pemotongan anggaran K/L sebesar Rp. 527,4 Miliar dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Ditjen Perhubungan Udara : Rp. 1.083,2 Miliar
 - b. Ditjen Perhubungan Laut : Rp. 707,6 Miliar
 - c. Ditjen Perhubungan Darat : Rp. 314,0 Miliar
 - d. Ditjen Perkeretaapian : Rp. 1.743 Miliar

Sedangkan terhadap kompensasi BBM, masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar :

 - a. Ditjen Perhubungan Laut : Rp. 197,95 Miliar
 - b. Ditjen Perhubungan Darat : Rp. 4.676,05 Miliar
5. Komisi V DPR RI dan Kementerian Perumahan Rakyat sepakat bahwa penambahan anggaran SAL tahun 2011 sebesar Rp 1.474 Miliar dengan rencana pemotongan anggaran K/L sebesar Rp. 149,95 Miliar, dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan : Rp. 65,9 Miliar
 - b. Deputi Bidang Perumahan Formal : Rp. 600 Miliar
 - c. Deputi Bidang Perumahan Swadaya : Rp. 808,4 Miliar
6. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sepakat bahwa penambahan anggaran SAL tahun 2011 sebesar Rp 200 Miliar dengan pemotongan anggaran K/L sebesar Rp. 114,5 Miliar dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur : Rp. 70 Miliar
 - b. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus : Rp. 15,5 Miliar

7. Komisi V DPR RI dan .../2

7. Komisi V DPR RI dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI sepakat memprioritaskan APBN-P untuk program/kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya untuk dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
8. Komisi V DPR RI dan seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI sepakat untuk mengagendakan pembahasan detail terhadap alokasi anggaran masing-masing sektor/program (per Eselon I) Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 – 22 Maret (Pembahasan detail);
 - b. Tanggal 26 dan 27 Maret (Finalisasi dan penandatanganan).

Catatan :

1. Surat/Ekspose Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pekerjaan Umum tentang pengalokasian SAL tahun 2011 dalam APBN-P 2012 untuk diserahkan kepada Komisi V DPR RI.
2. SiLPA 2012 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dialokasikan untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2012

KETUA RAPAT,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

DJAN FARIDZ

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**

ttd

SRI WORO B. HARIJONO

KEPALA BAPEL BPLS

ttd

SUNARSO

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

ttd

A. HELMY FAISHAL ZAINI

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

DARYATMO

**a.n. KEPALA BP-BPWS
DEPUTI PERENCANAAN**

ttd

MAURITS PASARIBU